



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN

Jalan Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126

Telepon (0271) 641442 Faksimile (0271) 648920

E-mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

NOTULEN

- Acara : Bimbingan Teknis Pengisian SAQ PPID 2024
- Hari, tanggal : Jumat, 16 Agustus 2024
- Pukul : 08.00 WIB - 11.30 WIB
- Peserta : 1. Ketua dan anggota Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi Tim Pelaksana Teknis PPID RSJD Dr. Arif Zainudin;
2. Ketua dan anggota Bidang Pengelola Data & Klasifikasi Informasi Tim Pelaksana Teknis PPID RSJD Dr. Arif Zainudin;
3. Ketua dan anggota Bidang Penyelesaian Sengketa & Informasi Tim Pelaksana Teknis PPID RSJD Dr. Arif Zainudin.
- Kegiatan : 1. Pembukaan kegiatan bimbingan teknis oleh Wakil Direktur Umum & Keuangan didampingi oleh Wakil Direktur Pelayanan;
2. Pembukaan oleh narasumber komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Ibu Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos;
3. Pengecekan dokumen PPID pada SAQ 2024.
- a. Aspek Sarana dan Prasarana
- 1) Audio visual apabila diunggah di youtube lebih baik memasukkan link youtube-nya langsung saat pengisian SAQ.
 - 2) Menambahkan fitur PPID pada aplikasi pendaftaran online Sipemandu.
 - 3) SK Tim PPID ditambahkan nomenklatur jabatan sebagai petugas layanan informasi publik.
 - 4) Foto saat pelayanan khusus kepada penyandang disabilitas.
- b. Aspek Kualitas Informasi
- 1) Membuat menu baru untuk informasi dikecualikan.
 - 2) Membuat surat keterangan nihil dokumen informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka.
 - 3) Menyampaikan klarifikasi disinformasi atau informasi tidak tepat, bisa dibuat flyer.
- c. Aspek Jenis Informasi
- 1) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan cukup mengunggah 1 dokumen saja namun lengkap dari proses pembentukan sampai menjadi peraturan/keputusa/kebijakan.
 - 2) Data statistik contohnya adalah data kunjungan pasien bukan data yang sudah diolah, agar terlihat *trend*-nya.
 - 3) Menambahkan laman tersendiri untuk dokumen perjanjian kerja sama.
 - 4) Membuat surat keterangan nihil dokumen persyaratan perizinan atau izin yang diterbitkan.
- d. Aspek Komitmen Organisasi
- 1) Regulasi tentang PPID adalah Perda No.6 Tahun 2012.
 - 2) Mengunggah Perdir Tarif Nomor 188/576/02/2021 sebagai dokumen penetapan standar biaya perolehan informasi publik.
 - 3) Surat keterangan nihil dokumen keberatan atas jawaban permohonan informasi, sengketa informasi, serah terima pemberian informasi hasil kesepakatan mediasi, pemberitahuan perpanjangan waktu, penolakan terhadap permohonan informasi, dan pelaksanaan putusan sengketa informasi publik.

- e. Aspek Digitalisasi
 - 1) Melampirkan SK satu data/open data.
 - 2) Memperbarui data di open data.
 - 3) Menggunakan file yang diunggah di open data untuk membuat kebijakan.
- f. Aspek Barang dan Jasa
 - 1) Mengunggah 2 paket pengadaan barang dan jasa tahun 2023 dan 2024.
 - 2) Apabila tidak ada dokumennya maka dijelaskan melalui surat keterangan nihil dokumen.

PIMPINAN RAPAT
Kabag Umum



PUJI HARTATI, SKM, M.Kes
Pembina (IV/a)
NIP. 19710318 199703 2 004

Dokumentasi

